

EDITORIAL

Besaran angka-angka statistik yang memberi gambaran tentang jumlah, peran dan fungsi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam perekonomian nasional, nampaknya belum sepenuhnya mendukung kemampuan dunia usaha memulihkan perekonomian nasional dari krisis yang pernah terjadi. Dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro, utamanya di sisi finansial dan fiskal diakui telah cukup tertangani secara baik. Tetapi di sisi mikro yang mencakup sektor riil termasuk KUMKM, terkesan tidak bergerak secara nyata (Johnny W Situmorang, 2008). Faktor utama penyebab kondisi tersebut adalah lemahnya sektor riil, terutama KUMKM, yang merupakan dampak dari rendahnya produktivitas mereka sebagai akibat dari belum kondusifnya iklim usaha.

Kebijakan pemerintah di bidang perijinan, permodalan, pengembangan teknologi, pasar dan informasi adalah elemen iklim usaha yang sangat penting yang dapat menjadikan suatu sistem perekonomian menjadi baik atau terdistorsi. Demikian pula dengan perubahan sistem pemerintahan sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia, yang mengarah ke sistem otonomi daerah, akan semakin membuka peluang bagi daerah untuk lebih mendorong meningkatkan performa KUMKM berdasar kepentingan peran UMKM dalam pembangunan daerah, kewenangan dan sumberdaya lokal yang dimilikinya.

Namun dalam suasana global seperti sekarang ini, kebijakan pemerintah, tidak bisa steril atau lepas dari pengaruh perekonomian dunia yang akhir-akhir ini tidak gampang lagi diprediksi. Ekonomi dunia setidak-tidaknya ditandai oleh kondisi “unbalanced economy” sebagai akibat dari “pertarungan ekonomi” antara Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat tengah menghadapi defisit neraca perdagangan, disusul dengan meningkatnya inflasi, naiknya suku bunga The Fed, serta fluktuasi nilai tukar uang dan pasar modal. Sementara itu China tengah menikmati surplus neraca perdagangan dan neraca modal, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (>10%). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, disamping dialami oleh beberapa negara-negara OECD, juga terjadi di Brasilia, India dan Uni Emirat Arab. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pada gilirannya telah memicu meningkatnya permintaan akan minyak yang mulai tidak seimbang dengan pasokan yang ada di pasar dunia, sebagai akibat berkurangnya produksi Venezuela dan Irak. Pada akhirnya akibat melambungnya harga minyak dunia, ekonomi dunia menjadi semakin tak menentu. Karena kenaikan harga minyak berimbas pada kenaikan harga beberapa komoditas pangan dunia seperti gandum/terigu, beras, kedelai, dan jagung.

Dari akibat lonjakan harga minyak tahun-tahun 2003-2005 saja, APBN tidak mampu lagi mananggung subsidi yang terus membengkak (sekitar Rp. 269 trilyun), dan defisit anggaran telah mencapai 2,5 – 4 %. Apalagi setelah Indonesia menjadi

negara yang *net importer terhadap minyak bumi*. Untuk menekan bebab subsidi, beberapa waktu yang lalu pemerintah akhirnya terpaksa menaikkan harga BBM sebesar 28,7%. Bagi dunia usaha, antara lain telah berakibat langsung pada meningkatnya biaya produksi, melemahnya daya saing, melemahnya nilai tukar rupiah, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan, serta fluktuasi harga sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana dengan KUMKM ? Pada periode tahun 2003 – 2005 nilai produksi KUMKM naik 10,6 %, sementara itu pada tahun 2008 diprediksikan naik sebesar 2,82%. Biaya produksi (2003-2005) naik 28,39 %, sementara itu pada tahun 2008 diprediksikan naik 7,47 %. Namun demikian pada periode yang sama KUMKM mengalami tingkat kerugian yang cukup besar yaitu 18,37%, pada tahun 2008, diprediksi kerugian akan naik lagi sebesar 4,87 % (Syarif dalam Rapma Siahaan, 2008).

Dalam menghadapi situasi ekonomi yang demikian itu diperlukan strategi pemberdayaan untuk terus mendorong daya saing KUMKM melalui peningkatan kualitas dan produktivitas KUMKM (dibidang SDM dan teknologi produksi), pengembangan pasar, jejaring usaha, kemitraan usaha, informasi pasar, dan peningkatan efisiensi. Bersamaan dengan itu yang juga tak kalah pentingnya adalah meningkatkan akses ke permodalan. Dalam tiga tahun terakhir, tak kurang dari 16 program pemberdayaan telah diluncurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan menyalurkan perkuatan modal senilai lebih dari Rp. 2,35 trilyun (Teuku Syarif, 2008). Belum lagi peluncuran 39 program dengan anggaran senilai Rp. 42 trilyun oleh 11 instansi pemerintah lainnya (Saudin Sijabat, 2008). Di antara program tersebut, antara lain misalnya KUBE (Depsos), P2KP (Dep. PU), Proyek Pemberdayaan Kecamatan (Depdagri), P4K (Deptan), UPPKS (BKKBN), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Dep. Kelautan dan Perikanan), Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri (Kantor Menko Kesra) dan lain sebagainya (Saudin Sijabat, 2008).

Walaupun dengan adanya berbagai Program Pemberdayaan KUMKM tersebut diharapkan percepatan pemberdayaan KUMKM dapat terlaksanakan dengan baik, tetapi dewasa ini baru sekitar 4 juta unit UMKM atau sekitar 8,13% saja yang telah mampu mengakses ke sumber permodalan. Dengan segala kurang lebihnya, pemberdayaan melalui pemberian perkuatan permodalan kepada KUMKM, dinilai amat bermanfaat, seperti yang antara lain diungkapkan oleh anggota dan masyarakat sekitar koperasi di daerah Brebes, Jawa Tengah (Riana Panggabean, 2008). Menurut catatan Saudin Sijabat (2008), pelayanan perkuatan modal juga telah meningkatkan omzet UMKM sebesar 20,91%, dan laba juga meningkat 27,88%. Oleh karena itu dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan sistem yang diperlukan guna lebih menjamin akuntabilitasnya, program pelayanan perkuatan modal kepada KUMKM perlu mendapatkan pertimbangan untuk terus dilanjutkan. “Semoga jayalah KUMKM di Indonesia”. (*Iskandar Soesilo & T. Syarif*)